

POLITICAL WILL PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO DALAM UPAYA OPTIMALISASI UMKM DI SIDOARJO

Silma Nuril Jannah¹, Arimurti Kriswibowo²

¹ Program Studi Administrasi Publik, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur,
Indonesia

silmanj74@gmail.com

² Program Studi Administrasi Publik, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur,
Indonesia

arimurti.adne@upnjatim.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar komitmen Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam upaya optimalisasi UMKM di Sidoarjo. Implikasi pada penelitian ini adalah sebagai bentuk pemulihan sektor perekonomian Kabupaten Sidoarjo yang bertumpu pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di masa pandemi COVID-19 diperlukan *political will* dari Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yang dilakukan dengan wawancara mendalam (*in-depth interview*), observasi, dan dokumentasi. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Sidoarjo memiliki tekad dan komitmen yang kuat untuk mengoptimalkan UMKM diukur menggunakan indikator *political will* dari Brinkerhoff (2010), yaitu inisiatif pemerintah, prioritas, mobilisasi dukungan politik, komitmen publik dan alokasi sumber daya, penegakan hukum, kontinuitas usaha, serta adaptasi dan belajar. Meskipun belum sempurna, upaya Pemerintah Kabupaten Sidoarjo didorong dengan niat baik Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo untuk UMKM dilakukan dengan pertimbangan yang matang, bertahap atau berkelanjutan.

Kata kunci: *Political Will*, Komitmen Pemerintah, Niat Pimpinan, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, UMKM.

Abstract

This study aims to determine how much the Sidoarjo Regency Government is committed to optimizing MSMEs in Sidoarjo. The implication of this research is that as a form of recovering the economic sector of Sidoarjo Regency which relies on Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) during the COVID-19 pandemic, political will is needed from the Sidoarjo Regency Government. This research uses descriptive qualitative method which is done by in-depth interview, observation, and documentation. The findings of this study indicate that the Sidoarjo Regency Government has a strong determination and commitment to optimize MSMEs measured using indicators of political will from Brinkerhoff (2010), namely government initiatives, priorities, mobilization of political support, public commitment and resource allocation, law enforcement, continuity of effort, also adaptation and learning. Although not perfect, the efforts of the Sidoarjo Regency Government are encouraged by the goodwill of the Regent and Deputy Regent of Sidoarjo for MSMEs, which are carried out with careful, gradual or sustainable considerations.

Keywords: Political Will, Government Commitment, Leader's Intention, Sidoarjo Regency Government, SMEs.

PENDAHULUAN

Kesejahteraan merupakan harapan bagi setiap warga negara. Teori Sosialisme juga menjelaskan bahwa aktivitas negara ditujukan pada pemenuhan kesejahteraan rakyatnya. Sejalan dengan teori tersebut, terdapat konsep *welfare state* (negara kesejahteraan) yang didefinisikan sebagai suatu negara yang memiliki kebijakan publik yang bersifat pelayanan, bantuan, perlindungan, dan *problem solving* bangsa (Hadiyono, 2020). Salah satu negara yang menganut konsep *welfare state* adalah Indonesia (Riwanto & Gumbira, 2017).

Konsep *welfare state* yang dianut oleh Indonesia dibuktikan dari tujuan negara Indonesia yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 alinea keempat yang berbunyi “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”. Sejalan dengan alinea tersebut, Aravacik (2019) mengungkapkan bahwa negara kesejahteraan mencakup mentalitas untuk melindungi rakyatnya yang memiliki kondisi ekonomi dan sosial yang buruk. Sehingga dapat disimpulkan kesejahteraan dapat dicapai dengan peningkatan dan pemberdayaan ekonomi.

Meskipun Indonesia menganut konsep *welfare state*, tingkat kesejahteraan di Indonesia masih terbilang cukup rendah. Hal ini dibuktikan dari *The Legatum Prosperity Index* pada tahun 2020. Dalam data tersebut, disebutkan bahwa pada pilar economic quality (kualitas ekonomi), Indonesia memperoleh peringkat yang rendah yakni ke-58. Meskipun masih jauh ada negara-negara dibawahnya, namun ini tidak praktis jika Indonesia sudah disebut negara yang sejahtera. Bagi Indonesia, semua masih sebatas cita-cita. Dengan situasi tersebut, Pemerintah Indonesia berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program pemberdayaan ekonomi masyarakat. Salah satunya adalah dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Dalam pemulihan dari kontraksi ekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, UMKM lah yang memainkan peran lebih sentral. Hal ini dikarenakan UMKM dapat menjadi pendorong permintaan domestik, penciptaan lapangan kerja, berinovasi dan bersaing secara nasional dan berpotensi secara regional (*Asian*

Development Bank, 2020). UMKM didefinisikan sebagai suatu badan produktif yang dimiliki oleh orang perseorangan atau unit usaha perorangan dengan kekayaan bersih maksimum, tidak termasuk tanah dan bangunan, sebesar 10 miliar rupiah, atau dengan penjualan tahunan maksimum 50 miliar rupiah. UMKM juga diatur dalam Peraturan Presiden (PP) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (Sumampouw et al., 2021).

Pertumbuhan UMKM di Indonesia terus mengalami peningkatan. Menurut Hafni & Rozali (2017), semakin bertambahnya tahun, maka laju pertumbuhan UMKM juga akan semakin meningkat. Hal ini dikarenakan banyak manfaat yang bisa didapatkan dari UMKM. Oleh karena itu, dari sisi regional, terdapat daerah yang dijuluki sebagai “Kota UMKM Indonesia”, yakni Kabupaten Sidoarjo. Namun sayangnya, di tengah perkembangan pesat UMKM di Sidoarjo, dunia dihebohkan dengan wabah virus COVID-19 yang diidentifikasi muncul pertama kali di Wuhan, China pada akhir tahun 2019, dan kemudian dinyatakan resmi masuk ke Indonesia untuk kali pertama pada awal bulan Maret Tahun 2020 (Nursofwa et al., 2020). Karena virus COVID-19 dapat menyebar secara cepat, maka dengan keadaan ini, berbagai tatanan kehidupan terombang-ambing dan akhirnya diklaim oleh WHO (*World Health Organization*) sebagai pandemi global atau biasa disebut pandemi COVID-19. Dan hal ini juga berdampak pada UMKM di seluruh Indonesia, termasuk Kabupaten Sidoarjo yang turut melemah dan tergoyahkan (Prajanti et al., 2021).

Melihat keadaan tersebut, langkah yang diambil Pemerintah Kabupaten Sidoarjo adalah pembuatan kebijakan yang terfokus untuk mengatasi penyebaran COVID-19 yakni dengan cara Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) hingga Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) (Komara et al., 2020). Namun, praktisnya, setelah melewati PSBB hingga PPKM, penerapan kehidupan normal yang baru (*new normal*) atau pelanggaran PSBB mulai di implementasikan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo sebagai suatu kebijakan baru dengan berbagai pertimbangan. Meskipun bukan perkara yang mudah bagi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk meramu strategi yang tepat dalam dua hal yang sangat bertentangan. Di satu sisi, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo harus berupaya menyelamatkan nyawa dengan karantina ketat. Namun disisi lain, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo juga harus memprioritaskan untuk menyelamatkan perekonomian yang kian hari melemah akibat pandemi COVID-19.

Maka dari itu, dengan ketidakpastian situasi ini, para pelaku UMKM perlu ada fasilitas, sarana dan prasarana dari pemerintah dalam upaya optimalisasi UMKM (Yuwana, 2020). Berkaitan dengan upaya pemerintah dalam optimalisasi UMKM, Bupati Sidoarjo dan wakilnya periode 2021-2026 memiliki *political vision*. yang dirumuskan dalam visi misinya. Sehingga sebagai upaya pencapaian *political vision* tersebut, perlu ada bentuk komitmen dari pemerintah atau disebut *political will*.

Menurut Treadway (2005) dalam Maher (2018), *political will* adalah “kesediaan aktor politik untuk mengeluarkan energi dalam mengejar tujuan politik”. Sehingga, dalam banyak keadaan, menciptakan *political will* menjadi tugas untuk mengembangkan kapasitas pemerintah. Sejalan dengan pendapat tersebut, *Civil Society Organizations* (CSO) dalam Ariyani & Nugroho (2017) mengatakan terkait *political will*, bahwa pemerintahan yang baik itu perlu kekuatan politik, efektivitas pemerintah dan keterlibatan aktif dari negara serta organisasi sosial masyarakat. Sehingga, implikasinya adalah kebijakan atau program yang dimiliki pemerintah tentu melibatkan publik, karena dasar dari pemerintah adalah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Namun, fakta yang terjadi adalah banyak kebijakan-kebijakan yang terimplementasi tanpa adanya *political will* dari pemerintah. Bahkan, meskipun ada peran pemerintah masih belum dirasa cukup efektif oleh masyarakat. Oleh karena itu, analisis Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam upaya optimalisasi UMKM melalui pendekatan *political will* diperlukan karena untuk mengetahui seberapa besar komitmen pemerintah dari kebijakan/program yang telah disusun terhadap masyarakatnya.

Gambaran yang lebih jelas tentang *political will* muncul dari pemilahan menjadi komponen yang bermakna dan terukur. Untuk menemukan gambaran yang jelas itu, Brinkerhoff (2010) berusaha mendekonstruksi karyanya dan karya penulis lainnya mengenai *political will* Brinkerhoff (2007); Brinkerhoff (2000); Brinkerhoff & Crosby (2002) yang didukung oleh analisis desain serta implementasi kebijakan pro-kaum miskin Anderson et al. (2005) Morissey & Verschoor (2003) hingga membentuk tujuh indikator *political will*. Adapun tujuh indikator *political will* tersebut adalah sebagai berikut :

1. Inisiatif Pemerintah;
2. Prioritas;

3. Mobilisasi Dukungan Politik;
4. Komitmen Publik dan Alokasi Sumber Daya;
5. Penegakan Hukum;
6. Kontinuitas Usaha;
7. Adaptasi dan Belajar.

Dalam penelitian ini, *political will* bukan berarti melakukan klaim perbanyak UMKM untuk mengeruk keuntungan material. Namun, apapun yang dikehendaki Pemerintah Kabupaten Sidoarjo benar-benar dari niat dan tekad yang tulus untuk menjadikan UMKM di Sidoarjo lebih baik dan optimal. Terlebih lagi, keberadaan UMKM sangat krusial untuk Kabupaten Sidoarjo karena struktur ekonomi Kabupaten Sidoarjo bertumpu pada sektor industri, perdagangan, dan UMKM (Pemerintah Sidoarjo, 2021). Berangkat dari realitas di atas, adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah “Bagaimana *political will* Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam upaya optimalisasi UMKM di Sidoarjo?” dengan tujuan untuk mengetahui seberapa besar komitmen Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam upaya optimalisasi UMKM di Sidoarjo.

METODOLOGI

Jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif, sehingga penelitian ini memanfaatkan data kualitatif dan dijabarkan secara deskriptif. Lokasi penelitian ada di Kabupaten Sidoarjo. Untuk lebih detailnya, peneliti menyinggahi beberapa tempat untuk menemui informan peneliti. Beberapa diantaranya yakni: 1) Kantor Bupati Sidoarjo untuk menemui Wakil Bupati Sidoarjo; 2) Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo untuk menemui Analisis Kebijakan Ahli Muda Bidang Perekonomian; 3) Dinas Koperasi dan UMKM Sidoarjo untuk menemui Kepala Seksi Bina Usaha Mikro; 4) Pengelola UMKM *foodcourt* De'kontjo Sidoarjo yang *foodcourt* tersebut diresmikan langsung oleh Wakil Bupati Sidoarjo; dan 5) Kecamatan Waru Sidoarjo untuk menemui Koordinator UMKM Kecamatan Waru Sidoarjo.

Fokus penelitian ini adalah *political will* Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam upaya optimalisasi UMKM di Sidoarjo dengan pisau analisis dari indikator *political will* menurut Brinkerhoff (2010). Selain menggunakan data primer yang diperoleh dari

para informan, peneliti juga menggunakan data sekunder yang berupa dokumen, web resmi, artikel, jurnal, berita, laporan, arsip dan studi pustaka lainnya yang berkaitan dengan fokus penelitian. Adapun teknik penentuan informan yang digunakan adalah teknik *purposive sampling*, sehingga informan yang dipilih sesuai dengan kompetensi dan memiliki relevansi dengan penelitian. Teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara mendalam (*in-depth-interview*), observasi dan dokumentasi. Sedangkan, data dianalisis menggunakan teori Miles, Huberman dan Saldana (2014), yakni dengan pengumpulan data (*data collection*), kondensasi data (*data condensation*), menyajikan data (*data display*), dan mengambil kesimpulan atau verifikasi (*conclusion drawing and verification*).

PEMBAHASAN

Menurut Brinkerhoff dalam Fauzy (2015), *political will* dapat dimaknai sebagai "niatan pimpinan" untuk melaksanakan hal-hal yang dinilai perlu untuk kebaikan bersama dalam jangka panjang. Maka kajian *political will* ini berasal dari visi misi kepemimpinan H. Ahmad Muhdlor Ali, S. IP dan H. Subandi, S.H sebagai Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo yang baru saja menjabat pada tahun 2021 lalu hingga tahun 2026. Periode jabatan tersebut tentu menjadi tantangan karena musibah pandemi COVID-19 yang masih berlangsung hingga saat ini. Meskipun begitu, dengan wajah dan semangat baru, Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo berusaha keras melalui program kerjanya demi memperbaiki dan membangun situasi pandemi COVID-19 yang polemik ini agar menjadi peluang bagi Daerah Sidoarjo. Oleh karena itu, agar program kerja yang diusung oleh Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo tidak menjadi retorika semata, maka perlu adanya pembuktian dari sisi komitmen dan niat pimpinan atau yang disebut *political will*. Untuk mengukur seberapa besar *political will* Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, penelitian ini menggunakan indikator dari Brinkerhoff (2010). Adapun masing-masing indikator akan diuraikan dan dijabarkan sebagai berikut :

1. Inisiatif Pemerintah

Inisiatif Pemerintah dapat dipahami sebagai komponen yang menyangkut sumber dorongan dari Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan membentuk program-program dalam mendukung UMKM di Sidoarjo. Hasil temuan ini memperlihatkan bahwa terdapat inisiatif dari Pemerintah Kabupaten Sidoarjo,

khususnya dari pimpinan daerah sendiri turut mengambil langkah. Langkah yang diambil Pemerintah Kabupaten Sidoarjo diungkapkan oleh Bapak Subandi sebagai Bupati Sidoarjo bahwa langkah yang diambil sebagai pemulihan ekonomi melalui peningkatan UMKM yang ada di Sidoarjo adalah melalui program, yang pertama, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo memberikan suatu pendampingan karena ini sedang musibah COVID-19, kalau dulu ibaratnya kegiatan jual beli bisa dengan tatap muka, tapi dengan skema sekarang tentu saja berbeda. Maka, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo mendampingi bagaimana berjualan dengan sistem media sosial. Untuk saat ini, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo sudah sosialisasi di seluruh tingkat kecamatan Sidoarjo. Kemudian yang kedua, tidak lepas dari keluhan UMKM terkait permodalan, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo memberikan anggaran yaitu dana KURDA. KURDA adalah Kredit Usaha Rakyat Daerah berupa bantuan atau subsidi bunga kredit ringan sebesar 3 (tiga) persen. Wakil Bupati Sidoarjo tersebut yakin jika skema yang digunakan minimal dapat memberikan gerak yang luas untuk UMKM. Selanjutnya yang ketiga, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo juga ada program bedah warung yang sudah disosialisasikan dan sudah mulai berjalan tahun 2022 ini. Program ini dilakukan untuk mendorong pelaku usaha agar bangkit dan mestabilkan perekonomiannya. Selain itu, ada KURMA, KURMA ini adalah bantuan 5-50 juta rupiah untuk kelompok perempuan. Semua program tersebut merupakan upaya untuk menaikkan UMKM untuk naik kelas.

Dari pengambilan keputusan tersebut, dapat dipahami bahwa terdapat keinginan yang kuat dari Pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk mengoptimalkan UMKM Sidoarjo melalui kebijakan/programnya. Tentunya, suatu kebijakan harus mengandung manfaat yang besar dan tidak menimbulkan kerugian (Kriswibowo et al., 2020). Hal ini juga disampaikan oleh Kepala Seksi Bina Usaha Mikro di Dinas Koperasi dan UMKM Sidoarjo bahwa program-program yang direncanakan sudah dipertimbangkan dengan sebaik-baiknya. Beliau juga yakin hal ini akan membawa dampak yang positif baik bagi pemerintah maupun masyarakat. Oleh karena itu, pada komponen inisiatif pemerintah, dapat disimpulkan bahwa inisiatif dari Pemerintah Kabupaten Sidoarjo cukup serius terhadap UMKM di Sidoarjo. Hal ini ditunjukkan oleh program-program *real* atau kebijakan yang diambil untuk

memajukan dan mengoptimalkan UMKM di Sidoarjo. Inisiatif yang dilakukan tentunya berasal dari pemikiran yang matang dan tidak melanggar segala aturan yang berlaku, karena inisiatif tersebut jelas merupakan tindakan yang bertujuan baik.

2. Prioritas

Prioritas dapat dipahami sebagai pilihan kebijakan atau program berdasarkan pertimbangan teknis, dan analisis keseimbangan opsi kebijakan atau program, antisipasi hasil yang memiliki kemungkinan buruk, dan peninjauan biaya dan manfaat. Dalam hal ini, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo memilih kebijakan atau program dalam upaya optimalisasi UMKM di Sidoarjo berdasarkan penilaian mereka sendiri tentang manfaat yang akan diperoleh, biaya yang harus dialokasikan, urgensi terhadap permasalahan yang kini terjadi. Sehingga, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dapat dipercaya tentang preferensi dan kemauan yang diturunkan secara independen untuk bertindak.

Mengingat adanya pandemi COVID-19 yang menyerang berbagai sektor dan masih menjadi permasalahan yang krusial bagi seluruh tatanan kehidupan, UMKM juga menjadi prioritas Pemerintah Kabupaten Sidoarjo saat ini. Selain karena Kabupaten Sidoarjo bertumpu pada UMKM serta industri perdagangan, UMKM dinilai mampu paling bertahan. Hal ini dinyatakan oleh salah satu Analisis Kebijakan Ahli Muda Bagian Perekonomian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo yakni :

“UMKM pasti menjadi prioritas Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, karena meskipun industri merupakan pengelolaan yang paling besar di Sidoarjo, tapi UMKM lah yang terbukti tahan banting, karena paling elastis menghadapi segala masalah. Jadi, setiap ada kebijakan itu sudah pasti kami mengutamakan untuk mendukung masyarakat kecil.”

Pernyataan di atas selaras dengan tema Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022, yakni “Pemulihan ekonomi, reformasi kesehatan dan sosial serta percepatan infrastruktur untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat”. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo benar-benar berupaya untuk pemulihan ekonomi dan kondisi sosial masyarakat, salah satu dengan menstimulasi UMKM. Sementara itu, peninjauan biaya dan manfaat Pemerintah Kabupaten Sidoarjo terhadap program-program UMKM dapat

dilihat pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2022.

Berdasarkan Peraturan Bupati Sidoarjo No. 93 Tahun 2021 tentang Penjabaran APBD tahun anggaran 2022 untuk program pemberdayaan UMKM meliputi pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan mencapai Rp. 21.232.783.375. Sehingga, sesuai dengan hasil wawancara dan data di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kabupaten Sidoarjo memang menjadikan UMKM dalam skala prioritas. Hal ini dibuktikan dari program yang telah disusun atas dasar penilaian mereka terhadap manfaat dari pertumbuhan UMKM. Selain itu, urgensi terhadap permasalahan yang kini terjadi di Kabupaten Sidoarjo, serta pertimbangan alokasi biaya untuk memaksimalkan kinerja program tersebut.

3. Mobilisasi Dukungan Politik

Mobilisasi dukungan politik akan dipahami sebagai komponen yang meliputi sejauh mana aktor publik berkonsultasi, terlibat, dan memobilisasi *stakeholder* dalam upaya optimalisasi UMKM di Sidoarjo. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo juga perlu memperluas fokus mereka, melampaui batas-batas lembaga masing-masing, dengan tujuan agar semakin sadar akan siapa dan apa yang ada diluar sana, dan mencari tahu cara menanggapi dengan tepat. Hal ini membutuhkan kapasitas untuk mengidentifikasi *stakeholder*, menciptakan ruang peluang untuk dialog dan partisipasi, mengkoordinasikan aksi bersama, menetapkan tujuan yang layak, membangun konstituen untuk perubahan, dan menyelesaikan segala konflik yang ada.

Segala kebijakan/program pemerintah tentu tidak lepas dari yang namanya politik. Hal ini dikarenakan politik dapat menjadi stimulan kekuasaan dan kepentingan dari aktor politik. Maka, tujuan politik dapat menjadi baik apabila arah kebijakan betul-betul digunakan untuk membangun kesejahteraan. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo terus berupaya membangun komunikasi dan konsolidasi agar semua pihak turut berpartisipasi mensukseskan program-program UMKM.

Tidak lepas negara ini sedang menjalani dua perang yang bersamaan, satunya perang memulihkan kesehatan, satunya lagi perang pemulihan ekonomi, sedangkan kedua hal ini adalah kunci kesejahteraan masyarakat. Maka untuk mencapai tujuan itu, salah satu bentuk upaya Pemerintah Kabupaten Sidoarjo memobilisasi dukungan politik untuk UMKM adalah Wakil Bupati Sidoarjo bersilaturahmi dengan Ketua Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (MWC NU) Se-Kabupaten Sidoarjo. Dengan adanya silaturahmi ini, Bapak Subandi berharap MWC NU turut mendukung UMKM melalui pelaksanaan pasar murah dan pameran UMKM di Kabupaten Sidoarjo.

Oleh karena itu, sebagai Wakil Bupati Sidoarjo yang bekerja bersama dengan Bupati Sidoarjo, strategi yang dimiliki Bapak Subandi berguna untuk memobilisasi dukungan politik dari berbagai elemen untuk menstimulus UMKM Sidoarjo. Sehingga, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo tidak hanya sekedar berinisiatif dan berkeinginan, namun juga memperluas fokus mereka untuk memikirkan apa yang dapat mereka bantu dan mereka ciptakan untuk UMKM.



Gambar 2. Kegiatan Wakil Bupati Sidoarjo silaturahmi dengan MWC NU
Sumber : Dokumentasi Wakil Bupati Sidoarjo, 2022

4. Komitmen Publik dan Alokasi Sumber Daya

Komitmen publik dan alokasi sumber daya dapat dipahami sebagai komponen yang berkaitan dengan sejauh mana Pemerintah Kabupaten Sidoarjo membuat keputusan dalam program-program yang mendukung pelaku UMKM dan memajukan UMKM di Sidoarjo. Komitmen publik dan alokasi sumber daya yang tepat dapat menggambarkan bahwa publik senang menjalani program atau

kebijakan karena tindakan yang dibuat pemerintah adalah hal yang baik dan benar. Sehingga, komponen ini berkontribusi pada penilaian positif *political will* Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

Komitmen publik yang diciptakan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo bertujuan agar masyarakat khususnya pelaku UMKM bersinergi terhadap pemulihan ekonomi Kabupaten Sidoarjo. Cara yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo adalah menjalin komunikasi dan mendekatkan diri ke lingkup UMKM. Dengan begitu, masyarakat merasa bahwa pemerintah bukan hanya sekedar pencitraan. Namun betul-betul dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Hal ini sesuai dengan pernyataan salah satu Analisis Kebijakan Ahli Muda Bagian Perekonomian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo bahwa untuk komitmen publik, dinas-dinas terkaitlah yang menjalin komunikasi langsung kepada masyarakat. Namun, Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo juga turut menghimbau kepada dinas terkait untuk melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai ada masyarakat yang merasa tersisih, tersingkir, tidak pernah dirangkul, dan sebagainya.

Tidak hanya memaksimalkan tugas dan fungsi dinas-dinas terkait, komitmen publik yang diciptakan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo adalah dengan menjalin komunikasi kepada masyarakat, mendengarkan keluhan mereka, dan mencari solusi bersama. Dengan begitu, masyarakat turut berkomitmen demi keberhasilan program-program UMKM. Hal ini dikarenakan pentingnya komitmen sebagai motor penggerak dalam mengimplementasikan kebijakan/program. Maka upaya tersebut terbukti mampu meningkatkan partisipasi para pelaku UMKM. Menurut Dinas Koperasi dan UMKM Sidoarjo, tidak disangka bahwa begitu banyak peminat KURDA hingga Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Delta Artha Sidoarjo selaku penyalur KURDA tidak cukup menampung antusiasme pelaku UMKM Sidoarjo, sehingga Pemerintah Kabupaten Sidoarjo sedang mengajak bank-bank lain sebagai penyalur KURDA. Oleh karena itu, ketika pelaku UMKM sudah banyak yang sadar akan manfaat program UMKM, maka rencana dan tujuan pemerintah tentu memiliki potensi yang besar segera tercapai.

Sementara itu, dari segi alokasi sumber daya juga diperlukan dalam mengukur seberapa besar *political will* Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Alokasi sumber daya

dalam konteks ini disebut penugasan sumber daya, yang muncul karena sumber daya terbatas sementara kebutuhan tidak terbatas. Dengan demikian, untuk pencapaian program-program yang diselenggarakan perlu ada pembagian peran. Adapun pembagian peran yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dijelaskan dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) tahun 2021 bahwa terdapat 3 (tiga) proses pencapaian program Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo, yakni proses manajemen, proses utama, dan proses pendukung. Pada proses manajemen, koordinasi dan evaluasi dilaksanakan Sekretariat Daerah (Setda), sinergitas dan legislatif dilaksanakan Sekretariat Dewan (Setwan), pengawasan dilaksanakan inspektorat, perencanaan dilaksanakan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda), anggaran dan keuangan dilaksanakan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD), serta manajemen sumber daya manusia dilaksanakan Badan Kepegawaian Daerah (BKD). Kemudian proses utama adalah implementasi program-program dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Dan yang terakhir ada proses pendukung yang dilakukan unsur kewilayahan masing-masing meliputi kecamatan, desa, dan kelurahan. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa memang ada komitmen publik yang diciptakan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Serta, alokasi sumber daya secara maksimum yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Dengan demikian, pemilihan kebijakan/program yang dibuat Pemerintah Kabupaten Sidoarjo merupakan tindakan yang baik dan benar.

5. Penegakan Hukum

Penegakan hukum dapat dipahami sebagai komponen yang berkaitan dengan implementasi regulasi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo terhadap para pelaku UMKM. Dalam hal ini, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo memiliki payung hukum yakni Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2021 tentang kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan UMKM. Dengan regulasi tersebut, akan dapat mendukung kebijakan/program yang dibuat Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

Dalam rangka, upaya Pemerintah Kabupaten Sidoarjo agar UMKM naik level. Maka untuk mencapai itu, UMKM juga harus memiliki legalitas usaha atau izin

usaha melalui Nomor Induk Berusaha (NIB). Kegunaan NIB ini penting untuk mendeteksi keberadaan UMKM se-Sidoarjo. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Sidoarjo menyampaikan bahwa upaya sosialisasi dilakukan secara langsung dengan tujuan mendekatkan layanan ke masyarakat. Kemudian tidak hanya pendaftaran NIB, DPMPTSP juga menyediakan layanan konsultasi perizinan berusaha dan konsultasi penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) (RadarSidoarjo.com, 2022). Upaya yang telah dilakukan tersebut sejalan dengan Peraturan Presiden No. 7 Tahun 2021 Pasal 51 menyebutkan bahwa “Dalam upaya pemberian layanan bantuan dan pendampingan hukum kepada UMKM, pemerintah pusat dan pemerintah daerah paling sedikit :

- a. Melakukan identifikasi permasalahan hukum yang dihadapi oleh Pelaku UMKM;
- b. Membuka informasi kepada pelaku UMKM mengenai bentuk dan cara mengakses layanan bantuan dan pendampingan hukum;
- c. Meningkatkan literasi hukum;
- d. Mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan program dari kegiatan layanan bantuan dan pendampingan hukum; dan
- e. Melakukan kerjasama dengan instansi terkait, perguruan tinggi dan/atau organisasi profesi hukum.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum Pemerintah Kabupaten Sidoarjo terhadap perlindungan UMKM terindikasi berhasil. Tindakan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo terhadap pelaku UMKM yang belum memiliki legalitas usaha juga sudah betul-betul disosialisasikan. Bahkan, dengan metode jemput bola agar pelayanan dapat dijangkau oleh pelaku UMKM.

6. Kontinuitas Usaha

Kontinuitas usaha akan dipahami sebagai komponen yang mempertanyakan usaha jangka pendek, menengah dan panjang yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, baik stafnya dan pemimpinnya dalam mendukung UMKM di Sidoarjo. Dalam upaya optimalisasi UMKM di Sidoarjo membutuhkan sumber daya dan usaha hingga jangka panjang. Maka dari itu, perlu ada tindak lanjut dari

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo atas implementasi program-program kerja yang mengarah pada UMKM.

Usaha Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam jangka pendek dapat dilihat pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka menengah, dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka panjang. Berpegang pada visi RPJPD Kabupaten Sidoarjo tahun 2005-2025 yakni “Kabupaten Sidoarjo yang Mandiri, Sejahtera, dan Madani”. maka tersusunlah penetapan strategi, arah kebijakan dan program pembangunan yang tertuang pada RPJMD dengan jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan, dan dimanifestasikan dengan RKPD tahun 2022. Sebagai pimpinan daerah saat ini, H. Ahmad Muhdlor Ali, S.I.P dan H. Subandi, S.H, menyeleraskan RKPD Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan rencana kerja Pemerintah Pusat Republik Indonesia dan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur sebagaimana disajikan pada gambar berikut.



Gambar 3. Keselarasan Kontinuitas Usaha Pemerintah Kabupaten Sidoarjo
Sumber : RKPD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022

Berdasarkan gambar di atas, dapat dilihat bahwa arah kebijakan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo tetap berfokus pada pemulihan ekonomi, dalam hal ini salah satunya dengan memberdayakan sektor UMKM, industri perdagangan, dan sebagainya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kabupaten

Sidoarjo betul-betul menunjukkan adanya kontinuitas usaha atas program dan kebijakannya. Kontinuitas usaha sangat penting dikarenakan dalam pencapaian tingkat kesejahteraan pun dibutuhkan waktu dan usaha yang terus menerus dengan skala yang berimbang dan proporsional.

7. Adaptasi dan Belajar

Adaptasi dan belajar akan dipahami sebagai komponen yang berkaitan dengan evaluasi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo terhadap program-program yang telah dibuat dan dilaksanakan. Selain itu, inovasi program juga diperlukan mengingat perkembangan zaman yang semakin pesat serta menyesuaikan keadaan yang bisa jadi berubah setiap waktu. *Political will* ditunjukkan ketika Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menetapkan proses untuk mengidentifikasi kemajuan program UMKM, dan secara aktif mengelola implementasi reformasi dengan beradaptasi pada keadaan yang muncul saat ini, seperti pandemi COVID-19 yang memengaruhi omset penjualan para pelaku UMKM.

Pada situasi pandemi COVID-19, semua strategi kebijakan atau program diarahkan untuk pemulihan keadaan dari yang memburuk agar tidak terpuruk. Dalam hal ini, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan juga pelaku UMKM harus beradaptasi dengan segala keadaan yang terjadi. Terlebih lagi, sebagai “Kota UMKM Sidoarjo”, tentunya UMKM merupakan salah satu penggerak roda perekonomian utama Kabupaten Sidoarjo. Hal ini juga disampaikan oleh Bapak Subandi selaku Wakil Bupati Sidoarjo bahwa karena musim pandemi gini, gimana arah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk pemulihan terlebih dahulu, memberikan *support* dulu, agar nanti minimal UMKM yang selama ini menjadi roh modal Sidoarjo ini tetap terkendali. Untuk sekarang, tantangannya adalah keadaan pandemi COVID-19 yang menjadikan akses tatap muka dibatasi, maka seluruh *stakeholder* harus beradaptasi dengan teknologi, dan tidak semua masyarakat melek terhadap teknologi. Maka Pemerintah Kabupaten Sidoarjo terus upayakan itu dan berharap semua bisa turut berperan. Wakil Bupati Sidoarjo mengungkapkan bahwa beliau jika semua solid, maka keadaan akan pulih kembali seperti sebelum adanya pandemi.

Serupa dengan apa yang disampaikan Bapak Subandi bahwa keberhasilan pencapaian program diperlukan sinergi dari seluruh *stakeholder*. Jika Pemerintah Kabupaten Sidoarjo telah merancang program sebaik mungkin, tapi tidak ada antusiasme dari masyarakat khususnya pelaku UMKM maka seluruh program terkait UMKM akan menjadi wacana belaka. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh salah satu Koordinator UMKM Kecamatan Waru Sidoarjo:

“Kita difasilitasi seperti ini ya seharusnya sudah sangat bersyukur. Kalau bagi UMKM yang tidak mau mengambil manfaatnya ya resiko mereka. Katakan Pemkab Sidoarjo mencanangkan UMKM naik kelas, tapi kalau pelaku UMKM nya sendiri yang tidak mau naik? Kemudian, seperti halnya Pemkab Sidoarjo mengadakan pelatihan tentang *digital marketing*, tapi terkadang pelaku UMKM nya banyak yang tidak hadir. Alasannya kuota menipis, atau lagi ada kegiatan, atau apalah. Maka tentu ini juga merupakan tantangan bagi Pemkab Sidoarjo.”

Dapat disimpulkan bahwa pada komponen ini, Pemerintah juga harus beradaptasi dan belajar terkait program-programnya, baik yang masih dalam tahap sosialisasi ataupun sedang diimplementasikan. Hal ini bertujuan agar Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dapat mengubah evaluasi menjadi inovasi terkait langkah selanjutnya. Serta, kritik membangun dari pelaku UMKM dapat menjadi aspirasi positif untuk UMKM di Sidoarjo lebih gemilang.

KESIMPULAN

Dari seluruh indikator yang sudah dijabarkan, upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam kaitannya untuk UMKM telah membawa hasil yang baik. Meskipun belum sempurna, namun Pemerintah Kabupaten Sidoarjo sudah menunjukkan komitmennya dan eksistensinya terhadap UMKM. Dengan demikian, *political will* Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam upaya optimalisasi UMKM di Sidoarjo cukup serius dan betul-betul dirasakan oleh masyarakat ditinjau dari 7 (tujuh) indikator Brinkerhoff (2010) yakni inisiatif pemerintah, prioritas, mobilisasi dukungan politik, komitmen publik dan alokasi sumber daya, penegakan hukum, kontinuitas usaha, serta adaptasi dan belajar. Sebagai bentuk pembelajaran, peneliti memiliki saran untuk pihak-pihak terkait :

- a. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo sudah melakukan yang terbaik selama ini, hanya saja harapannya semakin banyak pembuat kebijakan yang berasal dari orang yang paham betul atau orang yang mau belajar tentang kondisi lapangan seperti apa

- problematika dan keresahan masyarakat secara langsung, dengan tujuan agar kedepannya Pemerintah Kabupaten Sidoarjo semakin merangkul masyarakat.
- b. Pelaku UMKM sudah diberikan fasilitas oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, namun mereka pun punya hak untuk beraspirasi, sehingga harapannya dengan aspirasi tersebut, pelaku UMKM semakin berpartisipasi dan bersinergi dengan pemerintah.
 - c. Peneliti selanjutnya, agar dapat mengukur *political will* pemerintah dalam lebih banyak aspek. Hal ini bertujuan untuk memperluas pengetahuan tentang pentingnya *political will* dalam suatu kebijakan atau program.

DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, M., Branchflower, M., Moreno-Torres, & M. Besancon. (2005). *Measuring Capacity and Willingness for Poverty Reduction in Fragile States* (No. 6; PRDE (Poverty Reduction in Difficult Environments)).
- Aravacik, E. D. (2019). Social Policy and the Welfare State. In *Public Economics and Finance*. IntechOpen. <https://doi.org/10.5772/intechopen.82372>
- Ariyani, A. O., & Nugroho, A. H. (2017). Peran Political Will dan Organizational Culture Perusahaan Besi dan Baja. *Jurnal Economics and Sustainable Development*, 2(1), 1–13.
- Asian Development Bank. (2020). *Asia Small and Medium-Sized Enterprise Monitor 2020: Volume I-Country and Regional Reviews* (Vol. 1). <https://doi.org/10.22617/TCS200290-2>
- Brinkerhoff, D. W. (2000). Assessing Political Will For Anti-Corruption Efforts: An Analytic Framework. *Public Administration and Development*, 20(3), 239–252. [https://doi.org/10.1002/1099-162X\(200008\)20:3<239::AID-PAD138>3.0.CO;2-3](https://doi.org/10.1002/1099-162X(200008)20:3<239::AID-PAD138>3.0.CO;2-3)
- Brinkerhoff, D. W. (2007). Where There's a Will, There's a Way? Untangling Ownership and Political Will in Post-Conflict Stability and Reconstruction Operations. *Whitehead Journal of Diplomacy and International Relations*, 8(1), 111–121.
- Brinkerhoff, D. W. (2010). Unpacking The Concept of Political Will to Confront Corruption. *U4 Brief, 1*. <https://www.cmi.no/publications/3699-unpacking-the-concept-of-political-will-to>
- Brinkerhoff, D. W., & Crosby, B. . (2002). *Managing Policy Reform: Concepts and Tools for Decision-Makers in Developing and Transitioning Countries*

(Bloomfield). CT: Kumarian Press.

- Fauzy, A. (2015). Political Will Pemerintah Kabupaten Pelalawan Terhadap Pelestarian Satwa Di Taman Nasional Tesso Nilo Tahun 2011-2012. *Jom Fisip*, 2(2), 4–9.
- Hadiyono, V. (2020). Indonesia Dalam Menjawab Konsep Negara Welfare State dan Tatangannya. *Jurnal Hukum, Politik Dan Kekuasaan*, 1(1), 23. <https://doi.org/10.24167/jhpk.v1i1.2672>
- Hafni, R., & Rozali, A. (2017). Analisis Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Indonesia. *Ilmu Ekonomi Dan Studin Pembangunan*, 15(2), 77–96. http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/ekawan/article/view/1034/pdf_58
- Komara, B. D., Setiawan, H. C. B., & Kurniawan, A. (2020). Jalan Terjal UMKM dan Pedagang Kecil Bertahan di Tengah Pandemi Covid-19 dan Ancaman Krisis Ekonomi Global. *Jurnal Manajemen Bisnis*, 17(3), 342. <https://doi.org/10.38043/jmb.v17i3.2506>
- Kriswibowo, A., Khotimah, K., & Ardhana, R. (2020). Efektivitas Kebijakan Urban Farming dan Pahlawan Ekonomi dalam Kemiskinan Pengurangan di Kota Surabaya. *Jurnal Natapraja*, 8(1), 46–53.
- Maher, L. P. (2018). *Learning Political Will in Organizations: A Social Learning Theory Persepctive*. The Florida State University.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Method Sourcebook* (Third Edit). SAGE.
- Morrissey, O., & Verschoor, A. (2003). *What does Ownership Mean in Practice? Policy Learning and the Evolution of Pro-Poor Policies in Uganda*.
- Nursofwa, R. F., Sukur, M. H., Kurniadi, B. K., & . H. (2020). Penanganan Pelayanan Kesehatan Di Masa Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Hukum Kesehatan. *Inicio Legis*, 1(1), 1–17. <https://doi.org/10.21107/il.v1i1.8822>
- Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, Pub. L. No. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 93 Tahun 2021 (2021).
- Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022. (2022).
- Pemerintah Sidoarjo. (2021). *Forum Konsultasi Publik: Rancangan Awal rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah (RPJMD) Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026*.
- Prajanti, S. D. W., Sumastuti, E., Purwani, T., Soliha, E., Oktavilia, S., Rahutami, A.

- I., & Mutamimah. (2021). *UMKM Jejak, Aksi & Solusi saat Pandemi*. FASTINDO.
- Pratimi, R. P. (2022). *Perkuat Legalitas Usaha, Pemkab Dorong UMKM Miliki NIB*. Radar Sidoarjo. <https://radarsidoarjo.jawapos.com/ekonomi-bisnis/01/02/2022/perkuat-legalitas-usaha-pemkab-dorong-umkm-miliki-nib/>
- Riwanto, A., & Gumbira, S. W. (2017). Politik Hukum Penguatan Fungsi Negara untuk Kesejahteraan Rakyat (Studi Tentang Konsep dan Praktik Negara Kesejahteraan Menurut UUD 1945). *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 6(3), 337. <https://doi.org/10.25216/JHP.6.3.2017.337-360>
- Sumampouw, W., Kurnia, K., & Arrobi, I. R. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah Pasca Belakunya Undang-Undang Cipta Kerja. *Jurnal de Jure*, 13(1), 24–39.
- Yuwana, S. I. P. (2020). Coronanomics: Strategi Revitalisasi UMKM Menggunakan Teknologi Digital di Tengah Pandemi Covid-19. *Journal of Technopreneurship on Economics and Business Review*, 2(1), 47–59. <https://doi.org/10.37195/jtebr.v2i1.58>